ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN APARATUR BAPPEDA KOTA BANDUNG

Masa globalisasi pada saat ini menuntut adanya suatu sistem yang dapat menunjang berbagai kegiatan aparatur Pemerintah didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implementasi kebijakan tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang merupakan kebijakan yang dikeluarkan didalam menunjang pelaksanaan Musrenbang yang diadakan Bappeda Kota Bandung. Hal tersebut supaya pekerjaan dapat berjalan secara lebih transparan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan Musrenbang itu sendiri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang terdiri dari empat dimensi, yaitu *communication, resources, dispotitions or attitudes,* dan *bureaucratic structure* sebagai variabel X. Teori mengenai pelayanan menurut Ratminto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa, kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan sebagai variabel Y.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 orang peserta Musrenbang Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, penyebaran angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Uji statistik dalam penelitian ini didukung dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 19,* termasuk didalam melakukan analisis koefisien korelasi *rank spearman* untuk menentukan taraf tingkat hubungan kedua variabel.

Hasil penelitian menunjukkan variabel X memperoleh hasil persentase sebesar 83,47% yang termasuk kedalam kriteria baik. Variabel Y memperoleh hasil persentase sebesar 85,59% yang termasuk kedalam kriteria sangat baik. Koefisien korelasi sebesar 0,665 yang terdapat pada tingkat hubungan yang kuat. Hasil perhitungan koefisien determinasi memperoleh hasil persentase sebesar 44,22% dan sisanya sebesar 55,78% yang merupakan faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan *e-Government*, Kualitas Pelayanan